

Rencana Strategis

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEHARGA BERENCANA

2.

3.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun 2019 - 2023

Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan
Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatana Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik





Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotamobagu Tahun 2019-2023. Sasaran RPJMD tersebut harus dapat diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023.

Penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) agar dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien, memiliki daya ungkit terhadap pencapaian strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam mewujudkan visi dan misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yaitu dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi serta meningkatkan ketahanan keluarga.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023 menitikberatkan pada penajaman indikator sasaran, Indikator program dan indikator kegiatan, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* lingkungan dan tim penyusun RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu.

Akhirnya, kami berharap seluruh target sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkan suksesnya pelayanan KKBPK secara utuh dan menyeluruh di Kota Kotamobagu.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KOTA KOTAMOBAGU



MCH. ALJUFERI NGANDU, S.Pd.
NIP. 19711027 199702 1 002

Daftar Isi

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	v
	Daftar Singkatan	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KOTAMOBAGU	8
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana	8
	2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	18
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PP dan KB	23
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	31
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi ...	32
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
	3.3. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	43
	3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	46

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	50
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
	5.1. Strategi	52
	5.2. Kebijakan	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	56
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII	PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
2.1	Tugas Pokok dan Fungsi	
2.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan	18
2.3	Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	
2.4	Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselon	
2.5	Daftar Sarana dan Prasarana	
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.8	Faktor Internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.9	Faktor Eksternal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas PP dan KB	
3.2.	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan	
3.3	Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong	
3.4	Analisa SWOT	
3.5	Telaahan RENSTRA BKKBN	
3.6	Penentuan Isu-Isu Strategis	
4.1	Rata-rata Skor Strategis	
5.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
7.1	Rencana Program dan Kegiatan	
7.2	Indikator Kinerja Dinas	

DAFTAR SINGKATAN

LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
TFR	: Total Fertility Rate
ASFR	: Age Specific Fertility Rate
CPR	: Contraceptive Prevalence Rate
PUS	: Pasangan Usia Subur
WUS	: Wanita Usia Subur
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
BKB	: Bina Keluarga Balita
BKR	: Bina Keluarga Remaja
BKL	: Bina Keluarga Lansia
UPPKS	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
PPKS	: Pusat Pelayanan Konsling Keluarga Sejahtera
PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
PPKBD	: Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
PIK-R	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja
Alokon	: Alat dan Obat Kontrasepsi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu merupakan dokumen rencana dan berfungsi mengarahkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kota Kotamobagu dan bersifat indikatif. RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dijadikan tolok ukur dalam pencapaian RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu, dengan harapan capaian RENSTRA ini dapat melebihi sasaran RENSTRA BKKBN dan RENSTRA BKKBN Perwakilan Sulawesi Utara, sebagai ukuran baik tidaknya perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur, mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Kotamobagu.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah pelaksana bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

Agenda Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 yang dituangkan dalam RENSTRA, lebih menitikberatkan kepada upaya pengendalian penduduk serta upaya pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju harapan yaitu penduduk kota kotamobagu yang tumbuh seimbang dan sejahtera.

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk Kota Kotamobagu melalui pencapaian menurunnya angka kelahiran pada wanita usia subur atau Total Fertility Rate (TFR) melalui program pelayanan KB yang optimal dan terukur, meningkatkan median usia kawin wanita di Kota Kotamobagu melalui kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIK-R) baik jalur pendidikan maupun jalur kemasyarakatan, serta upaya pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka turut memberikan andil dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Penyusunan RENSTRA ini, juga diharapkan akan lebih mempermudah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka menghadapi tantangan antara lain, belum maksimalnya pemahaman stakeholder tentang pentingnya perencanaan pembangunan berbasis kependudukan, masih minimnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 1.2.6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1.2.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 1.2.10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 1.2.12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 1.2.13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 1.2.14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;

- 1.2.16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
- 1.2.17. Peraturan Walikota Kotamobagu No. 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019–2023 selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Kotamobagu di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada.

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019–2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam jangka menengah.
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu yang mencerminkan

penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Kotamobagu.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KOTAMOBAGU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu merupakan unsur pelaksana bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pengendalian Penduduk serta kegiatan Keluarga Berencana. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu mengacu pada Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis kota dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Penyiapan kebijakan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Pengelolaan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

6. Pengelolaan ketatausahaan dinas
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

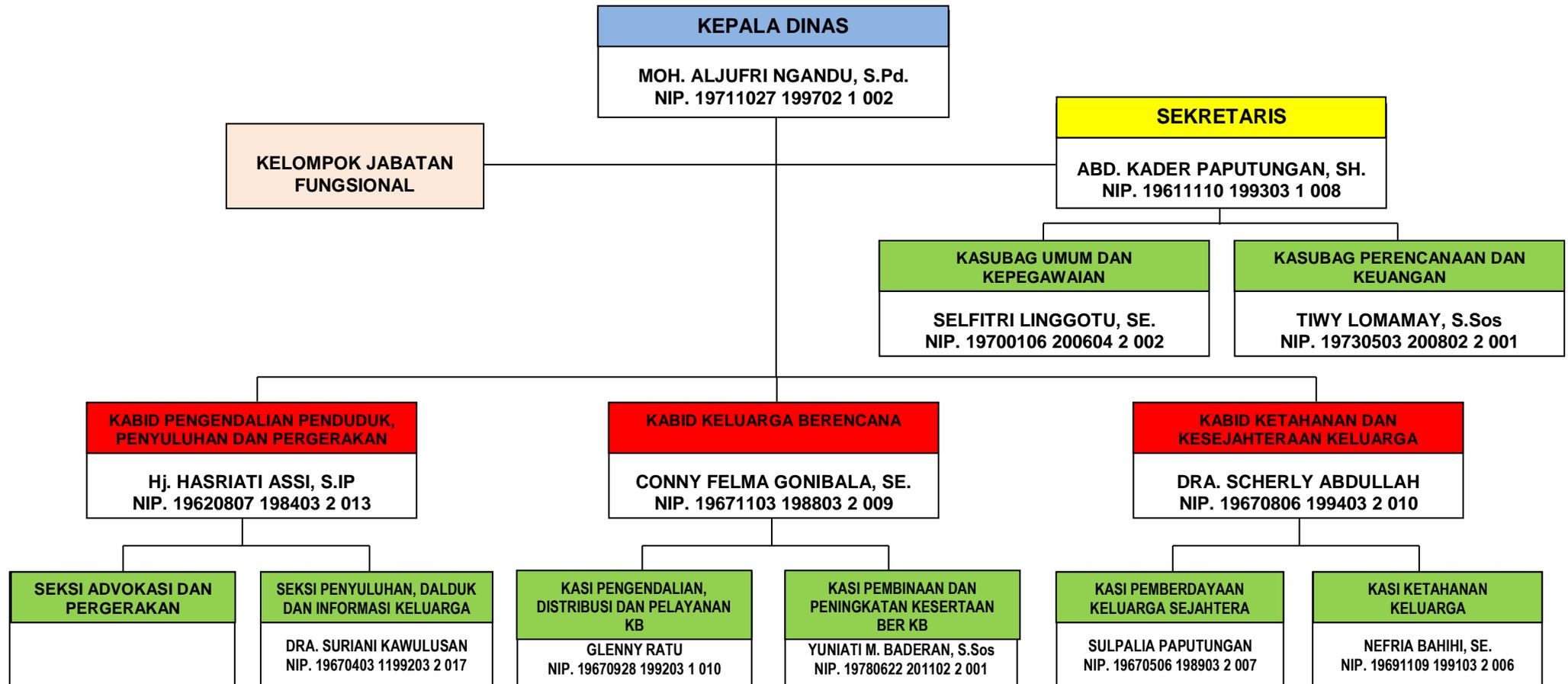
Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh, dan Pergerakan :
 1. Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 2. Kepala Seksi Penyuluhan, Pengendalian Penduduk dan informasi Keluarga;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana :
 1. Kepala Seksi Pengendalian, Distribusi, dan Pelayanan KB;
 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan ber - KB;
- e. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 2. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga
- f. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dapat dilihat seperti berikut ini :

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KOTA KOTAMOBAGU**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Nomor : 55 TAHUN 2016



Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B adalah :

Tabel 2.1.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 3) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 6) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 7) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2	Sekretaris	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi; 2) Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3) Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4) Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5) Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan; 6) Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun rencana dan program kerja untuk Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 3) Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi; 4) Menata dan memelihara sarana dan prasarana; 5) Menyiapkan bahan dan data kepegawaian; 6) Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; 7) Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan; 8) Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;

			<p>9) Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokol dan perjalanan dinas;</p> <p>10) Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;</p> <p>11) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/ aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;</p> <p>12) Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan;</p> <p>13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.	<p>1) Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;</p> <p>2) Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;</p> <p>3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;</p>

			<p>4) Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;</p> <p>5) Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/ keuangan dan belanja;</p> <p>6) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/ Anggaran;</p> <p>7) Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;</p> <p>8) Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;</p> <p>9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>10) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</p>
5	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan	1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

			<p>2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</p> <p>5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;</p> <p>6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB</p> <p>8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p>
--	--	--	--

			<p>10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan</p> <p>11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
6	Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan		<p>1) Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan; dan</p> <p>2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
7	Kepala Seksi Penyuluhan, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga		<p>1) Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB dan kader KB;</p> <p>2) Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan</p> <p>3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
8	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Melaksanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana Daerah.	<p>1) Merumuskan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana;</p> <p>2) Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana</p> <p>3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;</p> <p>4) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian</p>

			<p>dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;</p> <p>5) Pelaksanaan pelayanan KB Daerah;</p> <p>6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;</p> <p>7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;</p> <p>8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana;</p> <p>9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan</p> <p>10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
9	Kepala Seksi Pengendalian, Distribusi dan Pelayanan Keluarga Berencana		<p>1) Melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi;</p> <p>2) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB;</p> <p>3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
10	Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB		<p>1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB; dan</p> <p>2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan</p>

			sesuai bidang tugas dan fungsi
11	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; perumusan kebijakan teknis Daerah bidang KB; 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga balita; 4) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja; 5) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga lansia dan rentan; 6) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 7) Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera		<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
13	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga		<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; 2) Melakukan penyiapan bahan

			pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja; 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
--	--	--	--

2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/ organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi.

Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu berjumlah 26 orang, Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

Pendidikan	Sekretariat	Bidang KB	Bidang KS	Bidang DalDuk	Fungsional	Jumlah	Total

	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD / MI													
SLTP / MTS													
SLTA / MAS		3	1			1				1	1	5	6
D1													
D2													
D3													
S1	2	3		2		2		4	2	5	4	16	20
S2													
S3													
Jumlah	1	6	1	2		3		4	2	6	5	21	26
Total	7		3		3		4		8		26		

Tabel 2.3.

**Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Kotamobagu Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018**

Pendidikan	Sekretariat		Bidang KB		Bidang KS		Bidang DaIDuk		Fungsional		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a													
II/b		3										3	3
II/c													
II/d													
III/a		1										1	1
III/b								1				1	1
III/c		1	1	1					2	6	3	8	11
III/d		1				2					1	2	3
IV/a				1				3				4	4
IV/b	2					1					2	1	3
IV/c													
IV/d													
Jumlah	2	6	1	2		3		4	2	6	6	20	26

Total	8	3	3	4	8	26	
--------------	---	---	---	---	---	----	--

Tabel 2.4.
Keadaan Pegawai Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu
Berdasarkan Eselon Tahun 2018

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	II B	1
2	III A	1
3	III B	3
4	IV A	7
5	Staf	6
6	Fungsional	8
Jumlah		26

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu dilakukan

pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja SKPD. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum cukup, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.5.
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit/buah/set)	Kondisi		
			B	RR	RB
1	Bangunan /Gedung kantor tempat bekerja	1	√		
2	Bagunan Balai Penyuluhan KB	4	√		
3	Gudang alat/obat kontrasepsi	1		√	
4	Kendaraan dinas operasional beroda empat	6	√		
5	Mobil Unit Penerangan KB	2		√	
6	Mobil Unit Pelayanan KB Keliling	2		√	
7	Kendaraan Dinas operasional roda dua	26	√		
8	Mobil Akseptor	1	√		
9	Meja Kerja	9		√	
10	Meja rapat	16		√	
11	Kursi kerja	2	√		
12	Kursi Sofa	1	√		
13	Kursi panjang	2	√		
14	Lemari arsip	20		√	
15	Dispenser	1	√		
16	Papan struktur	1	√		
17	Meja Kerja Direksi	3	√		
18	Kursi kerja	2	√		
19	Kursi direksi	4	√		

20	Komputer	16		√	
21	Laptop	3	√		
22	Wireles	3		√	
23	Printer	12		√	
24	Camera digital	3	√		
25	Obgyn bed	4	√		
26	AC (air conditioner)	9	√		
27	Alat-alat kedokteran IUD Kit	4			√
28	Kipas angin	1			√
29	Smartphon	22	√		

KETERANGAN : B = Baik, RR = Rusak Ringan, RB = Rusak Berat

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat capaian kinerja dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode sebelumnya dimana tingkat capaian kinerja dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya digunakan tiga pendekatan sistem yakni norma (aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan), struktur/penguatan kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Kotamobagu. Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Renstra Periode sebelumnya (Tahun 2013–2018) ditetapkan pada dua tahun terakhir Renstra (Tahun 2017 dan Tahun 2018) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu sebagai dasar pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu.

Adapun capaian prestasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Tabel Prestasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tahun	Jenis Penghargaan/ Prestasi
1	2018	Satya Lencana Pembangunan Bidang KKBPK
2	2018	Juara I dan Juara III Duta Genre Tingkat Provinsi
3	2018	Motivator KB Pria
4	2018	Kampung KB Percontohan
6	2017	Kampung KB Percontohan
7	2016	Juara KB Lestari Tingkat Provinsi
8	2018	Juara I dan Juara II Lomba Pidato Kependudukan Tingkat Provinsi

Selanjutnya capaian indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu adalah :

1. Dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) angka kelahiran (TFR) dari target 2,38 tercapai pada Tahun 2018.
2. Capaian Peserta KB Aktif dari target 78% dari Pasangan Usia Subur tercapai pada Tahun 2018.
3. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB dari target 41,2% tercapai pada Tahun 2018.

Dengan demikian dari 3 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , ketiga-tiganya tercapai. Data ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.6.
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu
Provinsi Sulawesi**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET	TARGET IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Total Fertility Rate (TFR)		2,38				2,9	2,38				2,8	2,38				-3,57	0,00
2	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		7				7	7				8	8				12,50	12,50
3	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		18				14	18				30	34				53,33	47,06
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,17				2,21	2,17				2,07	2,04				-6,76	-6,37
5	Ratio Akseptor KB		79				16.694	79				16.880	79				1,10	0,00
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		78				78	78				79	79				1,27	1,27
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		19				19	19				19	19				0,00	0,00
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		1,57%				1,57%	1,57%				1,57%	1,57%				0,00	0,00
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		9,30				9,30	9,30				9,30	9,30				0,00	0,00
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		34				34	34				37,10	37,70				8,36	9,81
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		25%				25%	25%				25%	25%				0,00	0,00
12	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		100%				100%	100%				100%	100%				0,00	0,00

13	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	72%				71%	72%				71%	72%				0,00	0,00
14	Rata-rata usia kawin pertama wanita (UKP)	22,98				22,98	22,98				22,98	22,98				0,00	0,00
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80%				79%	80%				80%	80%				1,25	0,00
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	81%				80%	81%				81%	81%				1,23	0,00
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	70%				69%	70%				70%	70%				1,43	0,00
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	125%				125%	125%				125%	125%				0,00	0,00
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	29				13	29				66	78				80,30	62,82
20	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	50				50	50				50	50				0,00	0,00
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%				100%	100%				100%	100%				0,00	0,00
22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%				100%	100%				100%	100%				0,00	0,00
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	41				51	41				51	41				0,00	0,00
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	115%				115%	115%				115%	115%				0,00	0,00
25	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%				100%	100%				100%	100%				0,00	0,00
26	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	73%				71%	73%				79%	80%				10,13	8,75

Untuk pertumbuhan anggaran dan realisasi Dinas Pengendalian Penduduk Kota Kotamobagu dapat terlihat bahwa :

- a. Pertumbuhan anggaran dan realisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu pada Tahun 2017 ke Tahun 2018, adalah 11,83% hal ini menunjukkan kenaikan anggaran sebesar 11,83% dari Tahun 2017.
 - Pada Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2018, terdapat penurunan anggaran sebesar 33,98% akibat dari 8 orang ASN yang dialihkan ke Pusat sehingga penggajiannya dialihkan ke pusat pusat.
 - Belanja Langsung meningkat 32,02% akibat peningkatan dari Pagu DAK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Belanja Barang dan Jasa meningkat sebesar 55,4% akibat meningkatnya pagu DAK Non Fisik di Tahun 2018.
 - Belanja Modal menurun hingga 261,3% dari tahun sebelumnya akibat efisiensi anggaran di semua OPD

- b. Jika dilihat dari Ratio realisasi anggaran, terdapat penurunan sedikit jika realisasi anggaran pada Tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2017, ini diakibatkan oleh dana DAK fisik yang tidak semuanya terserap

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu
pada Periode Renstra Sebelumnya

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	2017	2018	1	2	3	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Belanja				5.328.226.689,00	6.043.258.425,00				4.963.718.532,00	5.606.555.250,00				93,2	92,8	11,83	11,47
2	Belanja Tidak Langssung				2.476.223.153,00	1.848.199.050,00				2.508.619.266,00	1.824.453.894,00				101	98,7	-33,98	-37,50
3	Belanja Langsung				2.852.003.536,00	4.195.059.375,00				2.455.099.266,00	3.782.101.356,00				86,1	90,2	32,02	32,02
4	Belanja Pegawai				53.520.000,00	70.250.000,00				53.520.000,00	62.900.000,00				100	89,5	23,81	23,81
5	Belanja Barang dan jasa				1.689.723.536,00	3.817.925.375,00				1.625.781.266,00	3.412.708.856,00				96,2	89,4	55,74	55,74
6	Belanja modal				1.108.760.000,00	306.884.000,00				775.798.000,00	306.492.500,00				70	99,9	-261,30	-153,12

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu.

Berikut disajikan Analisis SWOT dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8

Analisa SWOT pada pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

Eksternal/Internal	STRENGTH	WEAKNESS
		1. Komitmen Pemerintah 2. Kerjasama lintas sector 3. Sumber daya 4. Banyaknya Faskes 5. Fasilitas Pelayanan KB Mobile 6. Sumber Dana dari DAK
	SO	WO
OPPORTUNITIES		
1. Komitmen Pimpinan Daerah 2. Pembinaan Ketahanan Keluarga menjadi Prioritas lintas sector 3. Kapasias Teknis Stakeholder 4. Komitmen DPR 5. Komitmen mitra kerja 6. Bonus Demografi	Sumber daya manusia pada dinas terkait, lintas sektor, komitmen mitra kerja dan masih kurangnya pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kurangnya sumber daya manusia pada dinas terkait dan sarana prasarana yang belum terpenuhi dalam menunjang program KKBPK serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Reproduksi
THREATH	ST	WT
1. Kurangnya ASN, PKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan. 2. Kurangnya tenaga Penyuluh 3. Belum tersedianya Dana untuk PPKBD, Sub PPKBD dan Kader 4. Masih rendahnya pengetahuan tentang KRR bagi remaja di luar sekolah 5. Tingginya urbanisasi	Sumber daya manusia yang baik dan terlatih namun masih kurang untuk memenuhi kebutuhan, serta belum tersedianya Dana Operasional yang memadai untuk IMP sehingga pencapaian target Program KKBPK belum maksimal serta angka kelahiran masih tinggi	Dengan kurangnya SDM dan dukungan anggaran sehingga menjadi kendala dalam pencapaian Program KKBPK secara keseluruhan yaitu penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 3.1

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
<p>Jabatan Kepala Dinas:</p> <p>Tugas: Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 3) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 6) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 7) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	<p>Tidak ada permasalahan</p>

<p>Jabatan Sekretaris</p> <p>Tugas: Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi; 2) Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3) Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4) Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5) Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan; 6) Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	<p>Tidak ada Permasalahan</p>
<p>Jabatan: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>Tugas: Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.</p> <p>Fungsi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun rencana dan program kerja untuk Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 3) Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi; 4) Menata dan memelihara sarana dan prasarana; 5) Menyiapkan bahan dan data kepegawaian; 6) Melaksanakan penataan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya ASN 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

<p>pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan; 8) Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian; 9) Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas; 10) Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga; 11) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/ aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; 12) Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan; 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	
<p>Jabatan: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</p> <p>Fungsi: Menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.</p> <p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan; 2) Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja; 3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya ASN 2) Kurangnya diklat tentang pengelolaan keuangan

<ol style="list-style-type: none"> 4) Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja; 5) Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/ keuangan dan belanja; 6) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/ Anggaran; 7) Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran; 8) Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan; 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; 10) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	
<p>Jabatan: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan</p> <p>Tugas: Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas Penyuluh KB 2) Pendataan berbasis keluarga yang belum kontinu untuk pembuatan parameter kependudukan

<p>dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</p> <p>5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;</p> <p>6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB</p> <p>8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan</p> <p>11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	
<p>Jabatan: Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan</p> <p>Fungsi:</p> <p>1) Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan; dan</p> <p>2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>1) Tidak adanya kepala seksi</p> <p>2) Terhambatnya advokasi dan pergerakan akibat kurangnya tenaga lapangan</p>
<p>Jabatan: Kepala Seksi Penyuluhan, Pengendalian</p>	

<p>Penduduk dan Informasi Keluarga</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB dan kader KB; 2) Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlunya pemutakhiran data yang akurat setiap tahun
<p>Jabatan: Kepala Bidang Keluarga Berencana</p> <p>Tugas: Melaksanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana; 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana; 4) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah; 5) Pelaksanaan pelayanan KB Daerah; 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB; 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana; 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana; 9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang 2) <i>Unmeetneed</i> yang masih tinggi 3) Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi

<p>Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian, Distribusi dan Pelayanan Keluarga Berencana</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi; 2) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB; 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Dropping</i> Alokasi dari provinsi yang tidak tepat waktu 2) Masih adanya Faskes yang belum bekerjasama dengan BPJS
<p>Jabatan: Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB; dan 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia PPKBD dan Sub PPKBD untuk peningkatan kesertaan ber-KB
<p>Jabatan: Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Tugas: Melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; perumusan kebijakan teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya BKB, BKR, BKL dan UPPKS

<p>Daerah bidang KB;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga balita; 4) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja; 5) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga lansia dan rentan; 6) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 7) Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 	
<p>Jabatan: Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rendahnya pemberdayaan keluarga sejahtera
<p>Jabatan: Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; 2) Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja; 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya BKB, BKR, BKL dan UPPKS

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi	Angka kelahiran masih tinggi	Keikutsertaan ber-KB masih rendah
		Kurangnya pemahaman tentang kesehatan Reproduksi	Perlunya pemahaman tentang kesehatan reproduksi
2	Meningkatnya ketahanan keluarga	Masih kurangnya Pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan dan kemandirian ber-KB

Tabel 3.3

Faktor yang mempengaruhi permasalahan

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	Angka kelahiran masih tinggi	Keterbatasan <i>droping side effect</i>	Permintaan masyarakat terhadap KB tinggi
		Rendahnya pemahaman tentang manfaat penggunaan alat kontrasepsi	Adanya kelembagaan pengelolaan program KB yang kuat
		Masih terjadi rumor mengurangi ereksi dan masih ada yang memahami dilarang oleh keyakinan	Adanya motivator pria yang melakukan KIE

2	Kurangnya pemahaman tentang kesehatan Reproduksi	Pembentukan Pik – R yang masih rendah di sekolah / Masyarakat	Adanya dukungan dari Sekolah / Masyarakat dengan dibentuknya PIK-R di beberapa sekolah
		Partisipasi keluarga dalam BKB dan BKR masih rendah	Jumlah petugas desa dan wilayah cukup
		Dukungan anggaran dalam pembentukan dan pembinaan operasional petugas lini lapangan dan kader masih rendah bahkan tidak ada	Adanya dukungan Toma / Toga dan kader cukup memadai
3	Masih kurangnya Pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kelompok kelompok sulit menemukan terobosan baru untuk mengaja para anggota UPPKS untuk ber - KB	Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kelompok
		Keterbatasan Pengetahuan petugas	Tingkat motivasi oleh pembantu Pembina yang tinggi tapi terkendala dengan dukungan dana

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013–2018.

3.2.1. Visi Pembangunan Kota Kotamobagu:

Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menitik beratkan pada isu "Menuju Masyarakat Sejahtera".

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mendukung pencapaian isu "Menuju Masyarakat Sejahtera", terdapat pada pengendalian **laju pertumbuhan penduduk** melalui pelayanan prima di bidang Keluarga Berencana dengan target menurunkan Angka Kelahiran (TFR), penurunan angka pemenuhan KB yang tidak terlayani (*unmetneed*), peningkatan capaian peserta KB modern (CPR) serta peningkatan **kesejahteraan keluarga** melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dengan cara pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga melalui kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL).

"KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"

Tabel 3.4

Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

VISI	TUGAS POKOK DAN FUNGSI PD	HASIL TELAHAH
<p>"Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing"</p>	<p>Tugas: Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pengendalian Penduduk serta kegiatan Keluarga Berencana</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis kota dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3. Penyiapan kebijakan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Pengelolaan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana dan 	<p>Kedepan untuk mewujudkan Kota Kotamobagu yang masyarakat penduduk dan keluarga berencana meningkatkan pengendalian pada laju pertumbuhan penduduk melalui pelayanan prima di bidang Keluarga Berencana dengan target menurunkan Angka Kelahiran (TFR), penurunan angka pemenuhan KB yang tidak terlayani (<i>unmetneed</i>), peningkatan capaian peserta KB modern (CPR) serta peningkatan kesejahteraan keluarga melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dengan cara pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga melalui kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL).</p>

	Pembangunan Keluarga Sejahtera 5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 6. Pengelolaan ketatausahaan dinas 7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;	
--	--	--

3.2.2. Misi Pembangunan Kota Kotamobagu:

Berdasarkan visi yang ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menitikberatkan pada Misi 3 dari Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana berikut :

Tabel 3.5

Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

Misi	Tugas Pokok dan Fungsi	Hasil Telaah Misi
Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan: Tugas Pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, serta keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dalam mewujudkan misi 3 Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana fokus pada pelaksanaan program pengendalian penduduk, pergerakan

	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Advokasi dan Koordinasi di bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta menyelenggarakan KIE di bidang KKB 2) Penyusunan <i>Grand Design</i> kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta penyusunan parameter kependudukan. 3) Pengelolaan tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB 4) Pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 5) Penyusunan Proyeksi penduduk Kota Kotamobagu
--	---	---

	<p>bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB</p> <p>8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan</p> <p>11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	
	<p>Bidang Keluarga Berencana</p> <p>Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana Daerah.</p>	

	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana; 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana; 4) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah; 5) Pelaksanaan pelayanan KB Daerah; 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB; 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana; 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana; 9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan, penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi 2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pembinaan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi 3) Pelayanan KB
--	---	--

	<p>Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; perumusan kebijakan teknis Daerah bidang KB; 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga balita; 4) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja; 5) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga lansia dan rentan; 6) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, UUPKS) 2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam membangun keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga 3) Pembinaan kelompok remaja melalui PIK-R jalur pendidikan dan masyarakat
--	--	---

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Misi 3 Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Tujuan : Peningkatan Kualitas pelayanan publik secara universal, inklusif dan merata.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh sektor pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah misi ke tiga yaitu : ***Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.***

3.2.3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencapaian Visi dan Misi Kotamobagu Tahun 2019 -2023

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencapaian Visi dan Misi Kotamobagu Tahun 2019-2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.

Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

No.	VISI	KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDANGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING			
	MISI	MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN DATA RIIL, DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK			
	TUJUAN 1	ARAH KEBIJAKAN			
1	Tercapainya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya kesertaan ber KB			
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi			
	TUJUAN 2	ARAH KEBIJAKAN			
2	Terwujudnya peningkatan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya pemanfaatan kelompok Tribina dan UPPKS dalam pembinaan kemandirian ber-KB.			
			FAKTOR		
	Penunjang Urusan :	Permasalahan bidang urusan	Penghambat	Pendorong	

	(bidang/ urusan/ indikator) berdasarkan Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017				
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Peran dinas //badan dikampung KB masih rendah	Rendahnya pemahaman dinas / Badan tentang kampung KB	Dukungan Pemerintah dan masyarakat cukup tinggi tentang kampung KB, banyaknya Pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik yang memerlukan intervensi dari Dinas/Badan	
2	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Masih Kurangnya Sekolah Siaga Kependudukan, PIK-R jalur pendidikan, kelompok BKB HI,	Masih rendahnya pendidikan formal dan non formal yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal	Jangkauan letak geografis Sekolah yang mudah dijangkau, penyediaan sarana Advokasi tentang pendidikan kependudukan melalui DAK	
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR)	Penggunaan kontrasepsi non MKJP yang masih tinggi	Tersedianya Alokon MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile	
4	Ratio Akseptor KB	Masih rendahnya Persentase peserta KB aktif	PUS yang Ingin anak segera, ingin anak tunda, dan tidak ingin anak lagi yang tidak ber – KB	Tersedianya Alokon MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile,	
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-19 tahun Age Specific fertility Rate (ASFR)	Penggunaan kontrasepsi non MKJP yang masih tinggi	Tersedianya Alokon MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile	
6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20	Masih tingginya rata-rata usia kawin pertama wanita	Undang-Undang no.1 tahun 1974, adanya kehamilan yang tidak diinginkan	Pembentukan kelompok PIK-R jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan, dan	

	tahun			terbentuknya sekolah siaga kependudukan	
7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi	PUS ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi yang menggunakan KB tradisional	Tersedianya Alokon MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile dan fasilitas kesehatan yang terjangkau	
8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah	Minat terhadap kontrasepsi MKJP tertentu masih tinggi (IMPLANT) dibandingkan kontrasepsi MKJP yang lain serta tenaga medis teknis terlatih masih kurang	Tersedianya Alokon MKJP selain IMPLANT cukup banyak tidak tersedianya anggaran pelatihan khusus tenaga medis teknis	
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Masih rendahnya Anggota bina keluarga balita yang ber KB	Pemahaman keluarga yang mempunyai anak balita tentang tumbuh kembang anak balita masih rendah, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang. Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan pelatihan kader sangat rendah	Wilayah terjangkau, tersedianya sarana KIE BKB KIT, posyandu, kelompok bermain dan PAUD	
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Masih rendahnya Anggota bina keluarga remaja yang ber KB	Pemahaman keluarga yang mempunyai anak remaja tentang tumbuh kembang anak remaja masih rendah, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang. Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan 1pelatihan kader sangat rendah, sarana pendukung advokasi KIE belum	Wilayah terjangkau dan terbentuknya pusat informasi dan konseling remaja	

			tersedia	
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Masih rendahnya Anggota bina keluarga lansia yang ber KB	Pemahaman keluarga yang mempunyai lansia tentang lansia tangguh, sehat dan mandiri masih rendah masih rendah dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang. Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan pelatihan kader sangat rendah	Wilayah terjangkau, tersedianya sarana KIE BKL KIT, posyandu lansia
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Tenaga teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan belum tersedia	Belum tersedianya dukungan anggaran untuk Tenaga teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Telah terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dan kampung KB dan terbentuknya kelompok ketahanan keluarga
14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Masih kurangnya Pembentukan dan pembinaan kelompok PIK-R	Pemahaman tentang pentingnya PIK-R masih rendah terutama pada jalur kemasyarakatan, sarana dan prasarana pendukung masih kurang	Terbentuknya pusat informasi konseling remaja melalui jalur pendidikan, terpilihnya duta GENRE sebagai motivator dan terbentuknya forum GENRE
15	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Masih kurangnya tenaga PKB/PLKB yang didayagunakan	Terdapat beberapa kelurahan yang berpenduduk banyak, Ratio petugas lapangan (PKB/PLKB) yang tidak sesuai dengan jumlah Desa dan Kelurahan dan tidak adanya kewenangan daerah dalam rekrutmen Tenaga Penyuluh KB	Tersedianya fasilitas Sarana dan prasarana yang memadai, tenaga petugas lapangan KB yang dibiayai melalui APBD, dan telah dibekali dengan pelatihan kompetensi
16	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	Masih rendahnya Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan	Pengelolaan kelompok UPPKS pada umumnya masih bersifat perorangan,	Banyaknya kelompok UPPKS yang ada

	Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	pembinaan KB oleh pengelola UPPKS masih kurang		
17	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Mempertahankan Persentase Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Dukungan anggaran untuk operasional masih rendah	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, kampung KB telah terpenuhi serta tersedianya sarana penunjang yang bersumber dari DAK	
18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Kendala penyediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	Pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari provinsi yang terkadang tidak sesuai waktu dan tidak sesuai kebutuhan	Tersedianya alokasi mandiri di apotik dan faskes swasta	
19	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Masih adanya Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang belum bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Masih terdapat beberapa faskes swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS, mekanisme klaim yang cukup rumit	Tersedianya faskes pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS serta pelayanan mobile oleh dinas PP dan KB secara gratis	
20	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Belum terupdatenya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Anggaran pendataan data mikro keluarga yang tidak tersedia setiap tahun	Wilayah yang terjangkau, tenaga petugas pendata yang tersedia di setiap desa dan kelurahan serta kebutuhan data keluarga oleh pemangku kepentingan	

3.3 Telaahan RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Berbagai tingkatan dalam penuangan Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN Tahun 2015-2019, baik pada level sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), level komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada Visi dan Misi Pemerintah (Kabinet Kerja) Tahun 2015-2019. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah.

3.3.1. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I - RPJMN Tahun 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk **“mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”**.

3.3.2. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu:

- a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
- b. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- d. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Tabel. 3.7.
Telaan RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	Penggunaan kontrasepsi non MKJP yang masih tinggi	Tersedianya Alokasi MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile
		Persentase peserta KB aktif	PUS yang Ingin anak segera, ingin anak tunda, dan tidak ingin anak lagi yang tidak ber - KB	Tersedianya Alokasi MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile,
		Age Specific fertility Rate (ASFR)	Penggunaan kontrasepsi non MKJP yang masih tinggi	Tersedianya Alokasi MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile
		Age Specific fertility Rate (ASFR)	Penggunaan kontrasepsi non MKJP yang masih tinggi	Tersedianya Alokasi MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile
		Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi	PUS ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi yang menggunakan KB tradisional	Tersedianya Alokasi MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile dan fasilitas kesehatan yang terjangkau
		Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah	Minat terhadap kontrasepsi MKJP tertentu masih tinggi (IMPLANT) dibandingkan kontrasepsi MKJP yang lain serta tenaga medis teknis terlatih masih kurang	Tersedianya Alokasi MKJP selain IMPLANT cukup banyak tidak tersedianya anggaran pelatihan khusus tenaga medis teknis
		Tersedianya tenaga PKB/PLKB yang didayagunakan	Terdapat beberapa kelurahan yang berpenduduk banyak, Ratio petugas lapangan (PKB/PLKB) yang tidak sesuai dengan jumlah Desa dan Kelurahan dan tidak adanya kewenangan daerah dalam rekrutmen Tenaga Penyuluh KB	Tersedianya fasilitas Sarana dan prasarana yang memadai, tenaga petugas lapangan KB yang dibiayai melalui APBD, dan telah dibekali dengan pelatihan kompetensi
		Persentase Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Dukungan anggaran untuk operasional masih rendah	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, kampung KB telah terpenuhi serta tersedianya sarana penunjang yang bersumber dari DAK
		Tersedia dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi	Pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari provinsi yang terkadang tidak sesuai waktu dan tidak sesuai kebutuhan	Tersedianya alokasi mandiri di apotik dan faskes swasta
		Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang	Masih terdapat beberapa faskes swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS, mekanisme klaim yang cukup rumit	Tersedianya faskes pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS serta pelayanan mobile oleh dinas PP dan KB secara

		bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		gratis
		Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Anggaran pendataan data mikro keluarga yang tidak tersedia setiap tahun	Wilayah yang terjangkau, tenaga petugas pendata yang tersedia di setiap desa dan kelurahan serta kebutuhan data keluarga oleh pemerintah
	MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI	Pembentukan sekolah siaga kependudukan, PIK-R jalur pendidikan, kelompok BKB HI,	Masih rendahnya pendidikan formal dan non formal yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal	Jangkauan letak geografis Sekolah yang mudah dijangkau, penyediaan sarana Advokasi tentang pendidikan kependudukan melalui DAK
		Median usia kawin pertama wanita	Undang-Undang no.1 tahun 1974, adanya kehamilan yang tidak diinginkan	Pembentukan kelompok PIK-R jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan, dan terbentuknya sekolah siaga kependudukan
	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA	Anggota bina keluarga balita yang ber KB masih rendah	Pemahaman keluarga yang mempunyai anak balita tentang tumbuh kembang anak balita masih rendah, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang. Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan pelatihan kader sangat rendah	Wilayah terjangkau, tersedianya sarana KIE BKB KIT, posyandu, kelompok bermain dan PAUD
		Anggota bina keluarga remaja yang ber KB masih rendah	Pemahaman keluarga yang mempunyai anak remaja tentang tumbuh kembang anak remaja masih rendah, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang. Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan 1pelatihan kader sangat rendah, sarana pendukung advokasi KIE belum tersedia	Wilayah terjangkau dan terbentuknya pusat informasi dan konseling remaja
		Anggota bina keluarga lansia yang ber KB masih rendah	Pemahaman keluarga yang mempunyai lansia tentang lansia tangguh, sehat dan mandiri masih rendah masih rendah dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang. Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan pelatihan kader sangat rendah	Wilayah terjangkau, tersedianya sarana KIE BKL KIT, posyandu lansia
		Tenaga teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan belum tersedia	Belum tersedianya dukungan anggaran untuk Tenaga teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Telah terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dan kampung KB dan terbentuknya kelompok ketahanan keluarga
		Pembentukan dan pembinaan kelompok PIK-R	Pemahaman tentang pentingnya PIK-R masih rendah terutama pada jalur kemasyarakatan, sarana dan prasarana pendukung masih kurang	Terbentuknya pusat informasi konseling remaja melalui jalur pendidikan, terpilihnya duta GENRE sebagai motivator dan terbentuknya forum GENRE
		Anggota Kelompok	Pengelolaan kelompok UPPKS pada umumnya masih bersifat	Banyaknya kelompok UPPKS yang ada

		Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri masih rendah	perorangan, pembinaan KB oleh pengelola UPPKS masih kurang	
--	--	--	--	--

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasi berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat.

Dari beberapa masalah yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam kurun 5 tahun (2019-2023) mendatang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kotamobagu yakni :

3.4.1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

- a. Terbatasnya kualitas Sumber daya manusia dalam merencanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian penyuluhan dan pergerakan.
- b. Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
- d. Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat setiap tahun untuk kepentingan peta operasional penggarapan program;
- e. Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

- f. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS. Penyebab terbatasnya kualitas SDM aparatur karena kurangnya pelatihan penyuluhan.

3.4.2. Bidang Keluarga Berencana

- a. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah hal ini terbukti sampai saat ini baru 8 tenaga penyuluh yang seharusnya 17 orang dimana seharusnya satu penyuluh membina dua desa/ kelurahan
- b. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang ber-KB.
- c. Belum maksimalnya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi ke faskes dan masyarakat.
- d. Masih tingginya Total Fertility Rate
- e. Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
- f. Masih tingginya Unmeet Need
- g. Masih adanya Fasilitas Kesehatan selaku institusi pelayanan Keluarga Berencana di Lapangan yang belum bekerjasama dengan BPJS

Untuk memperoleh informasi apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	KODE
1	2	3
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	A
2	TFR tinggi belum mendukung penduduk tumbuh seimbang	B
3	Peran serta KB Pria masih kurang	C
4	Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat untuk kepentingan peta operasinal penggarapan program	D
5	Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga	E
6	Masih tingginya uneet need	F
7	Dukungan anggaran yang masih terbatas	G
8	Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi	H
9	Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah	I
10	Kurangnya pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR, dan BKL untuk peningkatan ketahanan keluarga	J

Tabel 3.9
Penetapan Nilai Isu Strategis

NO	KRITERIA	Bobot/Nilai
1	2	3
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembanguna daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	Jumlah	100

Tabel 3.10
Nilai Skala Kriteria

No	Kriteria	Pembobotan									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	10	8	10	8	9	10	10	10	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	20	20	20	20	18	20	20	20	20	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10	10	5	9	10	10	10	10	10	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20	15	10	10	20	18	15	21	19	21
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	15	10	10	10	10	10	10	12	10
	Total Skor	83	78	63	69	76	77	75	81	81	81

Tabel 3.11
Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Kriteria	Total Skor	Rata-rata skor
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	83	13.8
2	TFR tinggi belum mendukung penduduk tumbuh seimbang	78	13.0
3	Peran serta KB Pria masih kurang	63	10.5
4	Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat untuk kepentingan peta operasinal penggarapan program	69	11.5
5	Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga	76	12.6
6	Masih tingginya uneet need	77	12.8
7	Dukungan anggaran yang masih terbatas	75	12.5
8	Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi	81	13.5
9	Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah	81	13.5
10	Kurangnya pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR, dan BKL untuk peningkatan ketahanan keluarga	81	13.5

Berdasarkan pembobotan di atas, maka ditetapkan tiga Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
3. Peningkatan Ketahanan Keluarga

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dikaitkan dengan program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Terwujudnya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Keluarga

Sasaran :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Meningkatnya ketahanan Keluarga

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA THN KE -				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4						
1	Terwujudnya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Presentase Peserta KB Aktif (CPR)	Jumlah Peserta KB Aktif/ Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	79	79	80	80	80
			Menurunnya Presentase Angka Kelahiran (TFR)	$5\sum ASFR_i = 1$	2,17	2,13	2,1	2,07	2,04
			Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama	Jumlah (umur Kawin Wanita Pertama x Jumlah Wanita Menurut Usia Kawin Pertama)/ Jumlah Wanita Menurut Usia Kawin Pertama	21	21	22	22	22
			Persentase Keluarga Yang Di Data	Jumlah Keluarga yang telah di data/ Jumlah Keluarga x 100%	100	100	100	100	100
			Presentase PPKBD	Jumlah PPKBD/ Jumlah Desa Kelurahan x 100%	118	118	118	118	118
			Presentaase Layanan terhadap Remaja Tentang Reproduksi melalui PIK-R	Jumlah Kelompok PIK-R Remaja Aktif/ Jumlah Kelompok PIK-R x 100%	42	60	75	84	100
2	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Presentase PUS Anggota Kelompok BKB yang berKB	Jumlah PUS Anggota BKB yang Ber KB/ Jumlah PUS Anggota Kelompok BKB x 100%	79	80	80	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan upaya-upaya menyeluruh dalam menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan/ aktifitas.

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam mewujudkan visi dan misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yaitu dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi serta meningkatkan ketahanan keluarga.

5.2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pedoman ataupun rambu-rambu yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meningkatnya kesertaan ber KB, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemanfaatan kelompok Tribina dan UPPKS dalam pembinaan kemandirian ber-KB.

Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi : Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan data Riil Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1		SASARAN 1		STRATEGI 1	ARAH KEBIJAKAN 1
Tercapainya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesertaan ber KB
			2	Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi
TUJUAN 2		SASARAN 2		STRATEGI 2	ARAH KEBIJAKAN 2
Terwujudnya peningkatan Ketahanan Keluarga	1	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan tribina	1	Meningkatkan ketahanan keluarga.	Meningkatnya pemanfaatan kelompok Tribina dan UPPKS dalam pembinaan kemandirian ber-KB.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan disajikan dalam Tabel 6.1. sebagai berikut :

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KOTAMONAGU

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (otoucome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					THN 1		THN 2		THN 3		THN4		THN 5		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
Tercapainya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk				Persentase jumlah Penduduk yang ber - KB														
	<i>Menurunnya Laju pertumbuhan Penduduk</i>			Persentase Peserta Kb Aktif	79		79		80		80		80		80			
				Menurunnya persentase angka kelahiran (TFR)	2.17		2.3		2.1		2.07		2.04		2.04			
				Meningkatkan Median Usia Kawin	21		21		22		22		22		22			
				Persentase keluarga yang didata	100		100		100		100		100		100			
				Perentase PPKBD	118		118		118		118		118		118			
			1	Program promosi kesenatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat														
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun	1,57	40,256,000.00	1,57	40,256,000.00	1,57	40,256,000.00	1,57	40,256,000.00	1,57	40,256,000.00	1,57	201,280,000.00	DPPKB	KTG
				Total Fertility Rate (TFR)	2.27		2.13		2.1		2.07		2.04		2.122			
				Penyuluhan Ibu bayi dan anak	30	40,256,000.00	30	40,256,000.00	30	40,256,000.00	30	40,256,000.00	30	40,256,000.00	150	201,280,000.00	DPPKB	KTG
			2	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100	225,000,000.00	100	225,000,000.00	100	225,000,000.00	100	225,000,000.00	100	225,000,000.00	100	1,125,000,000.00	DPPKB	KTG
				Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT	80	225,000,000.00	80	225,000,000.00	80	225,000,000.00	80	225,000,000.00	80	225,000,000.00	400	1,125,000,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.15	3	Program Keluarga Berencana	100		100		100		100		100		100			DPPKB
				Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa														
				Laju Pertumbuhan Penduduk LPP	1,36		1,31		1,27		1,25		1,23		1,284			
				Total Fertility Rate (TFR)	2,17		2,13		2,1		2,07		2,04		2,102			
				Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	19		19		19		19		19		19			
				Terbentuknya Forum koalisi kependudukan dan FAPSEDU	1		1		1		1		1		1			
				Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	18	3,079,560,100.00	22	3,135,798,600.00	26	3,129,310,100.00	30	2,997,048,600.00	34	3,201,310,100.00	26	15,543,027,500.00		
				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	58,1		58,1		58,1		58,1		58,1		58,1			
				Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1		0		0		0		0		0,2			
				Cakupan PKB / PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100		100		100		100		100		100			
		2.08.2.08.1.15.08		Operasional PPKBD, Sub PPKBD	170	532,800,000.00	170	532,800,000.00	170	532,800,000.00	170	532,800,000.00	170	532,800,000.00	850	2,664,000,000.00	DPPKB	KTG
				Orientasi Pencatatan dan pelaporan bagi PPKBD dan Sub PPKBD	170	41,000,000.00	170	41,000,000.00	170	41,000,000.00	170	41,000,000.00	170	41,000,000.00	850	205,000,000.00	DPPKB	KTG
				Rapat Kerja Daerah Program KKBPK	1	83,000,000.00	1	83,000,000.00	1	83,000,000.00	1	83,000,000.00	1	83,000,000.00	5	415,000,000.00	DPPKB	KTG
				Rapat Telaahan Program KKBPK	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	5	150,000,000.00	DPPKB	KTG

		2.08.2.08.1.15.09		Pelaksanaan Harganas	Terlaksananya Harganas Tingkat Kotamabagu dan Keikutsertaan dalam Harganas Provinsi dan Nasional (Kegiatan)	1	226,673,000.00	1	226,673,000.00	1	226,673,000.00	1	226,673,000.00	1	226,673,000.00	5	1,133,365,000.00	DPPKB	KTG	
				Integrasi Kampung KB	Presentase Penanganan Kampung KB Secara Terintegrasi (Persen)	80	76,780,100.00	80	76,780,100.00	80	76,780,100.00	90	76,780,100.00	90	76,780,100.00	420	383,900,500.00	DPPKB	KTG	
		2.08.2.08.1.15.10		Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Tersedianya informasi Data Mikro Keluarga Kota Kotamabagu (Kegiatan)	1	98,261,500.00	0	0	1	102,261,500.00	0	0	1	106,261,500.00	3	306,784,500.00	DPPKB	KTG	
				Sarana Pembentukan Forum Koalisi Kependudukan, FAPSEDU dan SSK	Jumlah Forum koalisi kependudukan, FAPSEDU dan SSK (Kelompok/ Forum)	3	30,000,000.00	0	0	3	30,000,000.00	0	0	3	30,000,000.00	9	90,000,000.00	DPPKB	KTG	
		2.08.2.08.1.15.05		Pembinaan Keluarga Berencana			0		0		0		0		0	0	-	DPPKB	KTG	
				Penguatan Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK	Tersedianya Operasional Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK (Orang)	3	36,000,000.00	3	36,000,000.00	3	36,000,000.00	3	36,000,000.00	3	36,000,000.00	15	180,000,000.00	DPPKB	KTG	
		2.08.2.08.		Advokasi KIE Melalui Pemutaran Film	Jumlah Advokasi KIE Melalui Pemutaran Film (Advokasi)	60	75,000,000.00	60	75,000,000.00	60	75,000,000.00	60	75,000,000.00	60	75,000,000.00	300	375,000,000.00	DPPKB	KTG	
				Sosialisasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan Melalui Pengelolah Pendidikan formal, informal dan nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan dalam Proses Belajar Mengajar (Sekolah)	40	20,000,000.00	45	25,000,000.00	50	50,000,000.00	50	50,000,000.00	60	60,000,000.00	245	205,000,000.00	DPPKB	KTG	
				Sosialisasi dan Updating Hasil Grand Design Kependudukan	Terupatdenya Grand Design Kependudukan (orang)	15	50,000,000.00	15	15,000,000.00	20	15,000,000.00	25	15,000,000.00	25	15,000,000.00	100	110,000,000.00	DPPKB	KTG	
				Pertemuan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Grand Desain	Jumlah Pertemuan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Grand Desain (Kegiatan)	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	5	175,000,000.00	DPPKB	KTG	
				Pengadaan Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD	Jumlah Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD (paket)	12	51,000,000.00	10	51,000,000.00	12	51,000,000.00	10	51,000,000.00	12	51,000,000.00	56	255,000,000.00	DPPKB	KTG	
				Pengadaan Sarana Kerja PKB / PLKB	Jumlah Sarana Kerja PKB / PLKB (Paket/Orang)	18	130,500,000.00	20	145,000,000.00	25	181,250,000.00	25	181,250,000.00	33	239,250,000.00	121	877,250,000.00	DPPKB	KTG	
				Pembentukan Motivator KB Pria	Jumlah Kelompok Motivator KB Pria yang terbentuk dan memahami Tupoksinya (Kelompok)	1	48,000,000.00	16	48,000,000.00	16	48,000,000.00	1	96,000,000.00	32	96,000,000.00	66	336,000,000.00	DPPKB	KTG	
							0		0		32		0		32	-	DPPKB	KTG		
				Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOP (Kegiatan)	1	23,545,500.00	1	23,545,500.00	1	23,545,500.00	1	23,545,500.00	1	23,545,500.00	5	117,727,500.00	DPPKB	KTG	
				Pengadaan sarana mobilitas kendaraan roda 2	Jumlah Kendaraan Operasional Roda Dua (Unit)	0	0	8	200,000,000.00	0	0	0	0	0	0	8	200,000,000.00	DPPKB	KTG	
				Penyusunan Data Profil Kependudukan	Tersedianya Informasi Profil Kependudukan (Dokumen)	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	5	50,000,000.00	DPPKB	KTG	
				Penyusunan Parameter dan Proyeksi Penduduk	Tersedianya Dokumen Parameter dan Proyeksi Penduduk (Dokumen)	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	5	75,000,000.00	DPPKB	KTG	
		2.08.2.08.15.12		Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dak non Fisik	Jumlah UPT yang terlayani Operasional (UPT/ Kecamatan)	4	1,500,000,000.00	4	1,500,000,000.00	4	1,500,000,000.00	4	1,500,000,000.00	4	1,500,000,000.00	20	7,500,000,000.00	DPPKB	KTG	
					Perentase layanan terhadap remaja tentang reproduksi melalui PIK-R	42		60		75		84		100		100				
		2.08.2.08.1.17	4	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,3		9,3		9,3		9,3		9,3		9,3			DPPKB	KTG
					Persentase penggunaan kotrasepsi jangka panjang (MKJP)	37,3	1,161,123,300.00	34,5	481,471,000.00	35,6	471,123,300.00	36,5	2,052,123.30	37,1	471,123,300.00	36,2	4,636,964,200.00			
					Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	78,8		78,8		79		79		79		78,92				
		2.08.208.1.17.06		Pelayanan konseling KB dan Pemasangan kontrasespsi KB	Jumlah yang terlayani pada kegiatan konseling KB dan Pemasangan kontrasespsi KB (PUS)	2.5	217,850,000.00	2.75	217,850,000.00	3.025	217,850,000.00	3.327	217,850,000.00	3.659	217,850,000.00	15.261	1,089,250,000.00	DPPKB	KTG	
		2.08.2.08.1.17.04		Pelayanan KB Medis operasi	Jumlah Peserta MKJP (MOW/MOP) (Orang)	25	112,500,000.00	25	112,500,000.00	25	112,500,000.00	25	112,500,000.00	25	112,500,000.00	125	562,500,000.00	DPPKB	KTG	
				Penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi	Jumlah Kegiatan Penyuluhan kesehatan Reproduksi (Kegiatan)	4	12,000,000.00	4	12,000,000.00	4	12,000,000.00	4	12,000,000.00	4	12,000,000.00	20	60,000,000.00	DPPKB	KTG	
				Penyediaan pelayanan KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah Aseptor yang terlayani KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin (Orang)	2	72,225,600.00	2	72,225,600.00	2	72,225,600.00	2	72,225,600.00	2	72,225,600.00	10	361,128,000.00	DPPKB	KTG	
				Pengadaan Sarana mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah Sarana mobilitas Tim KB Keliling (Unit)	0	0	0	0	0	0	1	891,000,000.00	0	0	1	891,000,000.00	DPPKB	KTG	

				Kegiatan Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/Bidan Praktek Swasta	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/Bidan Praktek Swasta (Kecamatan)	4	45,000,000.00	4	45,000,000.00	4	45,000,000.00	4	45,000,000.00	20	225,000,000.00	DPPKB	KTG		
				Pengadaan Alat Kesehatan KB	Jumlah Alat Kesehatan KB (Jenis)	5	690,000,000.00	0	0	0	690,000,000.00	0	0	10	1,380,000,000.00	DPPKB	KTG		
				Pertemuan Medis Teknis	Jumlah yang mengikuti Pertemuan (orang)	15	11,547,700.00	15	11,547,700.00	15	11,547,700.00	15	11,547,700.00	75	57,738,500.00	DPPKB	KTG		
		2.08.2.08.1.17.05		Sosialisasi Fasilitasi Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS	Jumlah Faskes yang ikut Sosialisasi Fasilitasi Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS (Faskes)	18	10,347,700.00	0	10,347,700.00	0	10,347,700.00	0	10,347,700.00	18	51,738,500.00	DPPKB	KTG		
		2.08.2.08.1.29	5	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lanangan															
		2.08.2.08.1.29.05		Pembangunan balai penyuluhan KKB tingkat kecamatan	Jumlah balai penyuluhan KKB tingkat kecamatan (Balai)	4	646,800,000.00	0	0	0	0	0	0	4	646,800,000.00	DPPKB	KTG		
		2.08.2.08.1.29.01		Pengadaan sarana kerja bagi UPT, PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK)	Jumlah sarana kerja bagi UPT, PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK) (Set)	3	409,668,000.00	0	0	0	0	0	0	3	409,668,000.00	DPPKB	KTG		
		2.08.2.08.1.29.11		Penggandaan sarana KIE KIT kependudukan KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) DAK	Jumlah sarana BKB KIT (Keg)	1	215,630,000.00	0	0	0	0	0	0	1	215,630,000.00	DPPKB	KTG		
			6	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	29	546,200,000.00	42	492,200,000.00	45	537,500,000.00	66	493,500,000.00	78	378,000,000.00	52	2,447,400,000.00	DPPKB	KTG
				Pembentukan kelompok PIK -R jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan	Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang terbentuk dan memahami Tupoksinya (Kelompok)	7	16,500,000.00	7	16,500,000.00	7	16,500,000.00	7	16,500,000.00	2	0	30	66,000,000.00	DPPKB	KTG
				Fasilitasi pembentukan forum genre jalur pendidikan dan masyarakat	Jumlah forum GENRE yang terbentuk dan memahami Tupoksinya (Organisasi)	1	39,700,000.00	1	39,700,000.00	1	40,000,000.00	1	41,000,000.00	1	42,000,000.00	5	202,400,000.00	DPPKB	KTG
				Pelatihan Pengelolah Kelompok PIK-R Jalur Kemasyarakatan	Jumlah Pengelolah PIK- Remaja/M yang terlatih (Orang)	78	50,000,000.00	51	30,000,000.00	129	75,000,000.00	51	30,000,000.00	309	100,000,000.00	618	285,000,000.00	DPPKB	KTG
				Lomba PIK - R Jalur pendidikan dan kemasyarakatan	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba PIK - R Jalur kemasyarakatan (Peserta)	29	32,000,000.00	42	32,000,000.00	45	32,000,000.00	66	32,000,000.00	78	32,000,000.00	260	160,000,000.00	DPPKB	KTG
				Pengadaan Genre KIT	Jumlah GENRE KIT yang tersedia (Paket)	12	408,000,000.00	11	374,000,000.00	11	374,000,000.00	11	374,000,000.00	6	204,000,000.00	51	1,734,000,000.00	DPPKB	KTG
			7	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	75	40,000,000.00	70	40,000,000.00	60	40,000,000.00	50	40,000,000.00	40	40,000,000.00	59	200,000,000.00		
				Sosialisasi Penanggulangan Narkoba , PMS, termasuk HIV AIDS	Jumlah PIK-R yang tersosialisasi dan memahami tentang bahaya PMS, Narkoba dan HIV/ AIDS (Kelompok)	10	40,000,000.00	10.00	40,000,000.00	15	40,000,000.00	15	40,000,000.00	15	40,000,000.00	65	200,000,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.16	8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase faskes dan jejaringnya (Diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	38,1	389,000,000.00	42,9	372,000,000.00	42,9	372,000,000.00	42,9	392,400,000.00	42,9	372,000,000.00	41,94	1,897,400,000.00	DPPKB	KTG
				Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi Remaja disekolah dan Kelompok PIK-R di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mengikuti Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Jalur Kemasyarakatan (Kelurahan/Desa)	29	372,000,000.00	29	372,000,000.00	29	372,000,000.00	29	372,000,000.00	29	372,000,000.00	145	1,860,000,000.00	DPPKB	KTG
					Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja disekolah (Sekolah)	33		33	33	33	33	33	33	33	165	-	DPPKB	KTG	
				Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Pertemuan Jejaring Faskes Pelayanan KB (Orang)	50	17,000,000.00	0	0	0	0	50	20,400,000.00	0	0	100	37,400,000.00	DPPKB	KTG
					Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi ditingkat keluarga														
					Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan Bina Psangan Usia subur/Anggota Tribina	79		80	80	80	80	80	80	80	80				
		2.08.2.08.1.23	9	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ((BKB) yang Ber KB	80		80	80	80	80	80	80	80	80			DPPKB	KTG
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber KB	70	392.500.000	70	180.000.000	70	380.000.000	70	180.000.000	70	170.000.000	70	1.302.500.000		
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	80		80	80	80	80	80	80	80	80				
				Pengadaan BKL KIT	Jumlah BKL KIT yang tersedia (Set)	34	212,500,000.00	0	0	32	200,000,000.00	0	0	0	66	412,500,000.00	DPPKB	KTG	
		2.08.2.08.1.23.01		Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Tribina	Jumlah Kader BKB yang terlatih dan memahami Tupoksinya (Orang)	120	180,000,000.00	120	180,000,000.00	120	180,000,000.00	120	180,000,000.00	100	170,000,000.00	580	890,000,000.00	DPPKB	KTG

			10	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan kelompok keluarga yang melakukan Pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	225,000,000.00	100	225,000,000.00	100	225,000,000.00	100	225,000,000.00	100	1,125,000,000.00				
				Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT	Jumlah BKB KIT yang tersedia (Paket)	40	225,000,000.00	40	225,000,000.00	40	225,000,000.00	40	225,000,000.00	200	1,125,000,000.00	DPPKB	KTG		
		2.08.2.08.1.18	11	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	42	106.597.400	43	86.876.200	44	62.700.000	45	62.700.000	46	62.700.000	44	381.573.600	DPPKB	KTG
					Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	125		125		125		125		125					
		2.08.2.08.1.18.02		Orientasi Kelompok UPPKS	Meningkatnya wawasan kelompok UPPKS tentang peningkatan Pendapatan Keluarga (Kegiatan)	1	33,658,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	33,658,000.00	DPPKB	KTG	
				Sarana Pembentukan Pusat pelayanan keluarga Sejahtera	Terbentuknya Pusat pelayanan keluarga Sejahtera (Kelompok)	4	12,739,400.00	0	0	0	0	0	0	0	4	12,739,400.00	DPPKB	KTG	
				Operasional Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Tersedianya laporan Pengelolah Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (Orang)	12	45,200,000.00	12	45,200,000.00	12	45,200,000.00	12	45,200,000.00	12	45,200,000.00	60	226,000,000.00	DPPKB	KTG
				Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia	Jumlah Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	5	75,000,000.00	DPPKB	KTG
				Sosialisasi Berwirausaha Sukses Bagi Kelompok UPPKS	Jumlah sosialisasi Berwirausaha sukses Bagi Kelompok UPPKS (Kegiatan)	0	0	1	26,676,200.00	0	0	0	0	0	1	26,676,200.00	DPPKB	KTG	
		2.08.2.08.1.24	12	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ((BKB) yang Ber KB	80		80		80		80		80					
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber KB	70	392.500.000	70	180.000.000	70	380.000.000	70	180.000.000	70	170.000.000	70	1.302.500.000		
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	80		80		80		80		80					
		2.08.2.08.1.24.02		Pembentukan BKB Holistik Integratif	Jumlah Kelompok Pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif (Kelompok)	7	15,000,000.00	8	15,000,000.00	10	15000000	12	15,000,000.00	14	15,000,000.00	51	75,000,000.00	DPPKB	KTG
				Monitoring Dan Evaluasi	Tersedianya Informasi tentang program yang telah dilaksanakan (Kali)	4	6,400,000.00	4	6,400,000.00	6	9,600,000.00	6	9,600,000.00	6	9,600,000.00	26	41,600,000.00	DPPKB	KTG
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif yang dilatih dan memahami Tupoksinya (Orang)	75	50,000,000.00	75	50,000,000.00	75	50,000,000.00	0	-	0	-	225	150,000,000.00	DPPKB	KTG
				Kegiatan Lomba Bina Keluarga Balita	Jumlah kegiatan lomba bina keluarga balita (Kegiatan)	4	15,000,000.00	5	15,000,000.00	5	17,500,000.00	5	17,500,000.00	5	17,500,000.00	24	82,500,000.00	DPPKB	KTG
					Meningkatnya kapasitas dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana														
					Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
		2.08.2.08.1.01	13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi perkantoran	90	1.221.957.550	80	1.172.355.050	90	1.103.895.800	90	1.095.395.800	90	1.185.395.800	88	5.779.000.000		
				Penyedia jasa Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Waktu penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12,00	6,000,000.00	12,00	6,000,000.00	12,00	6,000,000.00	12,00	600,000.00	12,00	6,000,000.00	60	37,000,000.00	DPPKB	KTG
				Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan (unit)	9	38,156,250.00	15	14,337,750.00	1.00	33,000,000.00	6.00	24,500,000.00	7.00	25,000,000.00	38	240,000,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyedia administrasi dan jasa keuangan (Bulan)	12	359,880,000.00	12	359,880,000.00	12,00	359,880,000.00	12,00	359,880,000.00	12,00	359,880,000.00	60	18,000,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.06		Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	42	6,000,000.00	42	1,000,000.00	42,00	10,000,000.00	42,00	10,000,000.00	42,00	10,000,000.00	210	157,464,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.08		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyedia Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12	48,000,000.00	12	48,000,000.00	12,00	48,000,000.00	12,00	48,000,000.00	12,00	48,000,000.00	60	17,000,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.01		Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermeterai (Lembar)	700	3,600,000.00	700	3,600,000.00	700,00	3,600,000.00	700,00	3,600,000.00	700,00	3,600,000.00	3500	267,040,250.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.02		Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	29,160,000.00	12	32,076,000.00	12,00	32,076,000.00	12,00	32,076,000.00	12,00	32,076,000.00	60	152,668,750.00	DPPKB	KTG
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (orang)	20	2,000,000.00	25	3,000,000.00	30,00	4,000,000.00	30,00	4,000,000.00	30,00	4,000,000.00	135	24,683,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.10		Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK Yang Tersedia (Jenis)	49	53,408,050.00	49	53,408,050.00	49,00	53,408,050.00	49,00	53,408,050.00	49,00	53,408,050.00	245	41,340,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.11		Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan pengadaan yang di sediakan (Lembar)	9.09	30,533,750.00	9.09	30,533,750.00	9.09	30,533,750.00	9.09	30,533,750.00	9.09	30,533,750.00	45.45	215,200,000.00	DPPKB	KTG

		2.08.2.08.1.01		Penyediaan Komponen Dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Jenis)	10	4,091,500.00	10	4,091,500.00	12.00	5,500,000.00	12.00	5,500,000.00	12.00	5,500,000.00	56	2,635,210,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.15		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (EKP)	3	8,268,000.00	3	8,268,000.00	3.00	8,268,000.00	3.00	8,268,000.00	3.00	8,268,000.00	15			
		2.08.2.08.1.01.17		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (orang)	1.5	43,040,000.00	1.5	43,040,000.00	1.50	43,040,000.00	1.50	43,040,000.00	1.50	43,040,000.00	7.5	425,000,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.01.18		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Konsultasi Dan Rapat Koodinasi Ke Luar Daerah (Kali)	85	589,820,000.00	79	556,120,000.00	69.00	466,590,000.00	69.00	466,590,000.00	77.00	556,090,000.00	379	146,840,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.02	14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	278.789.750	90	264.810.500	90	462.372.250	90	202.120.000	90	302.120.000	90	1.510.212.500		
				Rehabilitasi sedang / Berat gedung kantor	Jumlah atau Jumlah luasan gedung kantor yang akan di rehab sedang /berat (l)	1.00	100,000,000.00	-	-	4.00	250,000,000.00	-	-	3.00	75,000,000.00	8	63,156,250.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.02.09		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Meter)	-	14,337,750.00	-	49,502,250.00	-	33,000,000.00	60.00	-	-	50,000,000.00	60	50,656,250.00	DPPKB	KTG
					Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	10.00		11.00	-	-	-	-	10.00	-		31	772,160,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.02.07		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	-	-	9.00	38,156,250.00	-	-	5.00	25,000,000.00	-	-	14	52,400,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.02.22		Pemeliharaan Rutin/Berkalah Gedung Kantro	Cakupan Pemeliharaan Rutin Berkalah Gedung Kantor (bulan)	12.00	8,332,000.00	12.00	7,282,000.00	12.00	11,042,250.00	12.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	48			
		2.08.2.08.1.02.24		Pemeliharaan Rutin/Berkalah Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)	37.00	153,120,000.00	37.00	155,120,000.00	37.00	157,680,000.00	40.00	153,120,000.00	40.00	153,120,000.00	191	46,975,000.00	DPPKB	KTG
		2.08.2.08.1.02.28		Pemeliharaan Rutin Berkalah Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Pemeliharaan Rutin Berkalah Gedung Kantor (Unit)	10.00	3,000,000.00	32.00	14,750,000.00	29.00	10,650,000.00	29.00	12,000,000.00	29.00	12,000,000.00	129	77,720,000.00	DPPKB	KTG
					Meningkatnya Kapasitas aparatur dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
				Meningkatnya disiplin aparatur	Cakupan kapasitas aparatur dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana														
			15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Aparatur	90	46.975.000	90	27.720.000	90	25.000.000	0	0	90	25.000.000	90	124.695.000	DPPKB	KTG
				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Cakupan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (Pasarng)	36	21,975,000.00	0	0	0	0	0	0	40	25,000,000.00	76	261,760,000.00	DPPKB	KTG
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	cakupan jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (bh)	38	25,000,000.00	36.00	27,720,000.00	36.00	25,000,000.00	-	-	-	-	110	-	DPPKB	KTG
			16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	130.880.000	0	0	0	0	90	130.880.000	0	0	90	261.760.000	DPPKB	KTG
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	9	130,880,000.00	0	0	0	0	9	130,880,000.00	0	0	18	261,760,000	DPPKB	KTG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya akan menggunakan tiga pendekatan sistem yakni norma (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), struktur/ penguatan kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Kotamobagu.

Selanjutnya indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya angka Total Fertility Rate (TFR)
3. Meningkatnya Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
4. Menurunnya Rata-rata jumlah anak per keluarga
5. Meningkatnya Ratio Akseptor KB
6. Menurunnya PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
7. Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
8. Tersedianya Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
9. Meningkatkan Rata-rata usia kawin pertama wanita (UKP)
10. Meningkatnya anggota kelompok Tribina ber-KB
11. Terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

12. Meningkatnya jumlah Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
13. Terpenuhinya Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
14. Bertambahnya kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Selanjutnya indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA THN KE -					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		1	2	3	4	5	
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,09	1,36	1,31	1,27	1,25	1,23	1,23
Total Fertility Rate (TFR)	2,38	2,17	2,13	2,10	2,07	2,04	2,04
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	7	7	8	8	8	8	8
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	18	18	22	26	30	34	34
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,17	2,17	2,13	2,10	2,07	2,04	2,04
Ratio Akseptor KB	78,80	78,80	78,80	79	79	79	79
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	78,80	78,80	78,80	79	79	79	79
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	44	19	19	19	19	19	19
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	44	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	34,65	34,65	35,50	36,50	37,10	37,70	37,70
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	45%	45%	57%	66%	71%	72%	72%
Rata-rata usia kawin pertama wanita (UKP)	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	29	29	42	54	66	78	78
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	75	75	70	60	50	50	50
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	42	42	43	44	45	46	46
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	73%	73%	75%	77%	79%	80%	80%

Dalam penentuan indikator kinerja seperti yang tercantum pada tabel di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 halaman 223 yang memuat tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan hal-hal prioritas yang akan dicapai selama lima tahun kedepan.

Untuk memaksimalkan pencapaian indikator kinerja di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu akan menggunakan tiga pendekatan sistem yakni norma (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), struktur/ penguatan kelembagaan, dan sumber daya yang ada, dalam upaya melampaui target Provinsi ataupun target Nasional.

Pada gilirannya, pencapaian indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Kotamobagu pada akhir RPJM diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Kotamobagu, serta dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.